

**MASYARAKAT MINDANAO, ABU SAYYAF DAN MASALAH KEAMANAN
KAWASAN**

Oleh:

Al Chaidar¹

M. Akmal²

Saifullah Ali³

Nanda Amalia⁴

Dara Quthni Effida⁵

Herdi Sahrasad⁶

ABSTRACT

This article explores on the Abu Sayyaf radical movement, prospects for security in Sulawesi and Sulu sea is done by field research, to Mindanao and border islands in Sulu, Southern Philippines, our neighboring country. This study not only uses a security approach, but also a welfare and socio-cultural approach, believing that finding the root cause of Bangsamoro Philippines is the most important thing to do and look for a way out. Unfortunately, the Muslim Moro relationship with the Manila Government in many cases means confrontation and demands for free will.

The Filipino Muslims, the Moros, believe that they must fight for their security of life and security, live according to the values they believe in, have the power to decide their fate, this is what they continue to strive for. We are a predominantly Muslim nation of Indonesia, hoping that the struggle finds its culmination and the creation of peace in this highly dynamic region of culture, commerce, politics and science could be achieved.

Keyword: *Mindanao, Abu Sayyaf, Moro, MNLF, MILF, Sulu, Filipina, Asean, Indonesia.*

¹ FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

² FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

³ FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

⁴ FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

⁵ FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

⁶ Universitas Paramadina dan Universitas Muhammadiyah Jakarta

1. PENDAHULUAN

Masalah internasional tidak cukup hanya didekati dan diteliti dengan teori Hubungan Internasional (HI) yang dahulu mengabaikan peran atau faktor budaya. Ilmu Hubungan Internasional kini menaruh perhatian yang sangat serius pada penelitian-penelitian mengenai budaya dalam politik antarbangsa dan dunia.

Bahkan Umar Suryadi Bakry mencatat bahwa beberapa teori HI kontemporer telah mengajukan proposisi bahwa budaya membentuk hubungan internasional (*culture constructing international relations*). Kompleksitas hubungan internasional lebih leluasa didekati melalui perkembangan atau dinamika dalam kebudayaan dan hubungan-hubungan lintas budaya.⁷

Umar Suryadi Bakry mengungkapkan bahwa penelitian tentang aspek-aspek kebudayaan penting dalam studi HI, karena sedikitnya dapat membantu kita memahami hal-hal sebagai berikut ⁸:

Pertama, kita dapat memahami orientasi nilai budaya (orientation of cultural values) dari negara-negara lain. *Kedua*, membantu kita mengkonstruksi hubungan internasional yang didasarkan atas sikap saling memahami dan saling mengakui budaya pihak lain. *Ketiga*, kajian Umar Suryadi Bakry membuktikan bahwa pemahaman terhadap budaya lain akan

⁷ Umar Suryadi Bakry, Pemanfaatan Metode Etnograf dan Netnograf Dalam Penelitian Hubungan Internasional, jurnal *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2017 h.15-26. Sebagai bandingan lihat, Yu Xintian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002. Yu Xintian, *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, 2004.

⁸ Umar Suryadi Bakry, Pemanfaatan Metode Etnograf dan Netnograf Dalam Penelitian Hubungan Internasional, jurnal *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2017 h.15-26. Sebagai bandingan lihat, Yu Xintian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002. Yu Xintian, *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, 2004.

membuat kita lebih toleran terhadap budaya tersebut. Dengan saling belajar dari budaya lain, kita diharapkan bisa mengurangi tingkat keraguan dan ketidakpercayaan terkait toleransi budaya dalam pengertian toleransi yang aktif.⁹

Dalam kaitan ini, Kajian Antropologi dan Kebudayaan kami coba dayagunakan untuk menyumbangkan potensinya dalam memperkuat pendekatan HI untuk menelaah masalah internasional terkait Mindanao, Moro, Abu Sayyaf dan masalah keamanan kawasan Asia Tenggara .

Dalam beberapa tahun terakhir, Mindanao menjadi wilayah yang diperhatikan dengan cermat seiring dengan munculnya organisasi teroris Islamis yang berkaitan erat dengan konflik di Timur Tengah. Mindanao diyakini menjadi basis kelompok teroris Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah yang kemunculannya mengurangi peran kelompok pejuang kemerdekaan yang lebih moderat dan nasionalistis seperti Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Konflik Moro adalah sebuah pemberontakan yang sedang berlangsung di pulau Mindanao, Filipina. Pada 1969, ketegangan politik dan pertempuran terbuka berkembang di antara Pemerintah Filipina dan kelompok-kelompok pemberontak Muslim Moro. Pemberontakan Moro berujung pada pembantaian Jabidah, yang menewaskan 60 komandan Muslim Filipina atas operasi terencana untuk mengklaim kembali bagian timur negara bagian Malaysia Sabah. Sebagai tanggapannya, profesor Universitas Filipina Nur Misuari mendirikan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF, Moro National Liberation Front), sebuah kelompok pemberontak bersenjata yang berniat mendirikan Mindanao yang independen.

⁹ Umar Suryadi Bakry, Pemanfaatan Metode Etnograf dan Netnograf Dalam Penelitian Hubungan Internasional, jurnal *Global & Strategis, Th. 11, No. 2017 h.15-26*. Sebagai bandingan lihat, Yu Xintian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002. Yu Xintian, *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, 2004.

Bangsamoro adalah etnoreligius Muslim yang terdiri atas 13 suku Austronesia yang mendiami Filipina bagian selatan. Front Pembebasan Islam Moro atau dalam bahasa Inggris disebut Moro Islamic Liberation Front (MILF), adalah kelompok militan Islam yang berpusat di selatan Filipina, didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan pusat Filipina yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas Moro di Filipina selatan. Daerah tempat kelompok ini aktif dinamai Bangsamoro oleh MILF dan meliputi bagian selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan, Basilan, Tawi-Tawi dan beberapa pulau yang bersebelahan.

Pemberontakan Moro berakar dalam sejarah panjang pemberontakan orang Bangsamoro melawan penguasa asing, bermula pada aneksasi Amerika atas Filipina pada 1899. Sejak itu, pemberontakan Moro beralih melawan pemerintah Filipina. Konflik Moro di Filipina ini adalah sebuah konflik yang berkelanjutan dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan bahkan dikatakan masih berlanjut sampai abad 21 ini. Namun untuk pembahasan dalam konflik ini babakan waktu yang pakai sampai abad 20.

Kawasan Mindanao dan perairan Sulu di Filipina Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi wilayah yang diperhatikan pemerintah dengan cermat, seiring dengan munculnya organisasi teroris Islamis yang berkaitan erat dengan konflik di Timur Tengah.

Mindanao diyakini menjadi basis kelompok teroris Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah yang kemunculannya mengurangi peran kelompok pejuang kemerdekaan yang lebih moderat dan nasionalistis seperti Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok separatis terkecil dan kemungkinan paling berbahaya di Mindanao.

Kelompok Abu Sayyaf adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao sebagaimana ditulis Wikipedia. Di awal berdirinya,

Kelompok Abu Sayyaf melakukan penculikan dan meminta tebusan. Sebuah gerakan yang terus digunakan saat ini untuk mendapatkan perhatian dunia.

Penggunaan nama Abu Sayyaf sebagai nama kelompok ini karena nama ini berasal dari nama Profesor Abdul Rasul Sayyaf yang merupakan nama pejuang Mujahidin di Afganistan. Walaupun demikian, Kelompok Abu Sayyaf didirikan oleh Abdurajak Abubakar Janjalani, bekas anggota Front Nasional Pembebasan Moro pada awal 1990an di Basilian yang kini menjadi basis utama Kelompok Abu Sayyaf. Nama Abu Sayyaf sendiri berasal dari bahasa arab, yakni *Abu* yang berarti pemegang, dan *Sayyaf* yang artinya pedang. Jadi *Abu Sayyaf* berarti adalah sebuah kelompok pasukan pedang. Anggota kelompok Abu Sayyaf rata rata pernah berlatih militer di kamp pelatihan mujahidin di Afganistan. Pemimpin Abu Sayyaf telah berkali-kali berganti. Kelompok Abu Sayyaf pernah dipimpin oleh Khadaffi Janjalani sebelum akhirnya meninggal pada 4 September 2006 dalam aksi sebuah operasi penangkapan di wilayah selatan. Amerika Serikat disebut-sebut berada di balik aksi tersebut. Setelah Janjalani meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh Abu Sulaiman yang juga terbunuh pada Januari 2007.

Pemimpin Abu Sayyaf kini adalah Isnilon Totoni Hapilon alias Abu Abdullah yang telah tewas. Sebelumnya, Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 juta dolar AS. Pada tahun 2002 lalu, Hapilon dan empat anggota Abu Sayyaf Lainnya —Khadaffi Janjalani, Hamsiraji Marusi Sali, Aldam Tilao, dan Jainal Antel Sali— didakwa di Guam dan di Amerika Serikat sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2000 di Resort Dos Palmas. Dari kelima orang tersebut hanya Isnilon Totoni Hapilon yang saat ini masih hidup.

Diketahui bahwa Abu Sayyaf juga memiliki batalyon-batalyon, walaupun demikian, jumlah pasukan Kelompok Abu Sayyaf diprediksi tidak begitu besar. Bahkan dalam sebuah referensi dituliskan jika Kelompok Abu Sayyaf sengaja membatasi anggota mereka agar tidak disusupi agen pemerintah. Beberapa anggotanya pernah belajar atau bekerja di Arab Saudi

dan mengembangkan hubungan dengan mujahidin ketika bertempur dan berlatih di Afganistan dan Pakistan .

Pada awalnya penyokong dana utama Kelompok Abu Sayyaf adalah Mohammed Jamal Khalifa, salah saudara kandung dari Osama bin Laden. Setidaknya hal tersebut diakui oleh mantan pemimpin Abu Sayyaf, Khaddafy Janjalani. Kini, Abu Sayyaf telah bergabung dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Sham*). Saat ini Abu Sayyaf yang pada mulanya berafiliasi dengan Al Qaeda kini telah bergabung dengan ISIS sejak 2013 lalu. Saat itu Abu Sayyaf merilis video yang menunjukkan jika pemimpin mereka Isnilon masih hidup dan juga mengungkapkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Al Qaeda dan berbaiat kepada ABu Bakr al-Baghdadi.

Nama Abu Sayyaf kembali mencuat setelah baru baru ini, akhir maret 2016, melakukan penyanderaan terhadap 10 orang warga negara indonesia yang merupakan sekelompok pelaut. 10 orang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf bersama kapal mereka Anand 12. Kapal yang diawaki oleh orang indonesia ini bermuatan batubara dari Sungai Puting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kapal ini beserta kapten dan awak ditangkap dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya (*Harakatul Islamiyah*). Dilaporkan bahwa akhir-akhir ini mereka sedang memperluas jaringannya ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kelompok ini bertanggung jawab terhadap aksi-aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan dalam upaya mendirikan negara Muslim di sebelah barat Mindanao dan Kepulauan Sulu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya negara besar yang Pan-Islami di Semenanjung Melayu (Indonesia dan Malaysia) di Asia Tenggara.

Saat penyanderaan ini berlangsung, pada bulan April 2000 anggota Abu Sayyaf hanya melakukan operasi penyeberangan dari wilayah Negara Filipina bagian selatan menuju resort pulau wisata pulau Sipadan di wilayah Negara Malaysia. Di resort Malaysia mereka menculik 21 orang berkebangsaan Asing

terdiri dari 9 orang Malaysia, 3 orang Jerman, 2 orang Perancis, 2 Orang Afrika Selatan, 2 Orang Finlandia, 1 Wanita Libanon, 2 orang Filipina, seluruh korban penculikan ini dibawa ke camp Abu Sayyaf di Tawi Tawi untuk disandera kemudian dipindah ke Jolo. Setelah serangan militer Filipina gagal membebaskan para sandera sejumlah wakil Negara Eropa, Malaysia dan Libya bergabung dengan perundingan Filipina dalam upaya membebaskan sandera.

Kemudian berturut-turut menyandera tiga orang wartawan TV Perancis, dua orang Filipina dan beberapa pendeta Filipina yang berusaha mengunjungi sandera. Usaha perundingan dengan kelompok ini tidak berhasil untuk membebaskan semua sandera. Agustus 2000, para penyandera meminta uang tebusan satu juta dollar Amerika Serikat sebagai imbalan bila membebaskan tiga warga Negara Malaysia. Sementara itu pada tanggal 10 September 2000 malam, tiga orang warga Negara Malaysia dilarikan dari resort wisata pulau Pandanan di lepas Pantai Sabah Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan kapal motor berkekuatan tinggi melampaui kecepatan kapal angkatan laut Filipina.

Pada tanggal 21 Mei 2001 kelompok abu Sayyaf kembali menculik tiga warga negara Amerika Serikat dan tujuh belas warga Negara Filipina dari resort wisata Palawan di Filipina. Di akhir bulan Agustus 2001, seorang warga Negara Amerika Serikat turut di sandera setelah mengunjungi camp Abu Sayyaf sejumlah uang tebusan telah dibayarkan untuk melepaskan sandera ini.

Hingga akhir tahun 2001, kelompok Abu Sayyaf masih membawa dua orang warga Negara Amerika Serikat dan satu perawat warga negara Filipina di pulau Basilan hasil penculikan tujuh bulan lalu. Hal ini di ketahui saat kelompok tersebut menawarkan perundingan pembebasan mereka di kota Zamboanga bulan April 2002. Pada bulan Juni 2002 satu orang sandera warga-negara Amerika Serikat yaitu Martin Burnham telah meninggal dunia saat dilakukan penyerangan oleh pasukan Filipina terhadap basis Abu Sayyaf yang menyandera dia. Sedangkan istrinya Gracia Burnham dapat diselamatkan.

Sementara itu perawat Filipina yaitu Ediborah Yap ikut tewas saat operasi penyelamatan oleh militer Filipina ini.

Di bulan Juni 2002, Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing, Empat warganegara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah anak Buah Kapal (ABK) Kapal SM88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah. Penyergapan terhadap mereka dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan.

Kemudian bulan Maret 2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu AK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

Di bulan Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan aksi penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan awak kapal Tug Boat Brahma yang memuat batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Abu Sayyaf adalah momok dan nama sebuah kelompok teroris dan separatis militer berbasis Islam yang bermarkas di sekitar kepulauan Filipina Selatan terutama di daerah Jolo, Basilan, Tawi-Tawi dan Mindanao. Kelompok ini sering juga disebut sebagai kelompok teroris karena konsep perjuangan mereka yang berideologi Islam garis keras atau Islam radikal. Kelompok ini memiliki seorang ketua atau pimpinan yang dijuluki sebagai Khadaffi Janjalani.

Studi tentang prospek keamanan di laut Sulawesi dan laut Sulu ini dilakukan dengan penelitian ke lapangan, ke Mindanao dan pulau-pulau perbatasan di periran Sulu Filipina Selatan.¹⁰

Studi ini tidak hanya memakai pendekatan keamanan, melainkan juga pendekatan kesejahteraan dan sosial-kultural, dengan meyakini bahwa mencari akar permasalahan pada Bangsamoro Filipina adalah hal yang paling penting untuk dilakukan dan dicari jalan keluarnya. Celaknya, hubungan Muslim Moro dengan Pemerintah Manila dalam banyak kasus berarti konfrontasi dan tuntutan keinginan merdeka. Muslim Filipina, Bangsa Moro, meyakini bahwa mereka harus memperjuangkan jaminan hidup dan keamanan mereka, hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib, inilah yang terus diperjuangkan mereka. Kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, berharap perjuangan itu menemukan titik kulminasinya dan terciptanya perdamaian di kawasan yang sangat dinamis secara kultur, perdagangan, politik dan ilmu pengetahuan ini.

Bahwa pria dan wanita biasa menumpahkan darah mereka sendiri dan darah orang lain bersenjatakan perjuangan nasionalis nampaknya merupakan realitas dunia modern yang sulit diatasi. Kami mencoba memahami konflik semacam itu dengan mengidentifikasi latar belakang mereka; namun ini sering

¹⁰ Secara keseluruhan, studi ini memfokuskan kajian pada hal-hal sebagai berikut: (1) Latar belakang gerakan Abu Sayyaf dan basis ideologi mereka, (2) Pemetaan faksi-faksi di dalam tubuh Abu Sayyaf dan deskripsi hubungan di antara faksi-faksi tersebut, (3) Pemetaan hubungan antara Abu Sayyaf dengan kelompok lain yang juga memperjuangkan kepentingannya di Mindanao (misalnya *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF)), (4) Mendeskripsikan hubungan antara faksi-faksi Abu Sayyaf dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia dan di dunia internasional, (5) Menjelaskan peta hubungan antara faksi-faksi Abu Sayyaf dengan masyarakat dan elite lokal di Filipina Selatan, (6) Memberikan gambaran terkait dengan alasan diberikannya dukungan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan elite lokal terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf, (7) Menggambarkan kondisi sosial ekonomi kelompok-kelompok masyarakat di Mindanao yang mendukung operasi faksi-faksi Abu Sayyaf, serta (8) memaparkan hal-hal yang menjadi grievance, serta kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pendukung faksi-faksi Abu Sayyaf.

merupakan teka-teki paling sulit untuk dipecahkan tentang segala bentuk etnonasionalisme bersenjata: dari mana kemauan pangkat dan arsip untuk berperang dan mati demi bangsa calon?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan di Sekitar Laut Sulu Filipina Selatan

Filipina merupakan satu-satunya negara di Asia yang mayoritas (\pm 80%) penduduknya beragama Katolik. Filipina memiliki lebih dari 80 suku daerah dengan dialek bahasanya masing-masing. Bahasa Tagalog merupakan bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menjadikan Filipina sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang penduduknya paling banyak menggunakan bahasa Inggris.

Filipina memiliki potensi Sosial Budaya dan kekuatan demografis yang cukup baik. Mayoritas penduduk adalah rumpun bangsa Melayu, suku bangsa yang lain adalah suku bangsa Negrito (penduduk asli di Kepulauan Filipina), Mestizo, Cina, dan Moro. Potensi Perdagangan Filipina cukup moderat. Komoditas Filipina yang dapat dikembangkan dalam dunia perdagangan internasional adalah berbagai hasil pertanian, seperti serat manila, gula, kopra, buah-buahan, dan berbagai jenis kayu hutan. Selain itu, hasil industri dan pertambangan yang merupakan komoditas ekspor adalah tembaga, emas, perak, keramik, dan bijih besi.

Politik dan hubungan luar negeri Filipina juga sangat Amerikanistik. Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat. Dia ditata sebagai sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggiangkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai

kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu.

Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik 80%, hal ini disebabkan Filipina merupakan bekas jajahan Spanyol, dilanjutkan dengan Protestan 10%, hal ini karena Filipina dijajah Amerika Serikat, dilanjutkan dengan Islam 5% yang mayoritas berada di Pulau Mindanao, lalu Buddha 2.5% yang merupakan penduduk pendatang dari Korea Selatan, Republik Rakyat China, Malaysia, Singapura, Jepang, India, dan Vietnam. Sebanyak 0.4% menyatakan dirinya Atheis, [rujukan?] dan 2.1% beragama lain.

2.2. Isu Otonomi dan Masalahnya

Konstitusi Filipina 1987 mengesahkan pembentukan Daerah Otonom di Mindanao Muslim (Autonomous Region in Muslim Mindanao atau ARMM). Undang-undang Republik No. 6734 (1 Agustus 1989) mengatur pembentukan dan operasi ARMM yang, dalam plebisit pada tanggal 17 November 1989, meliputi Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi. Executive Order No. 463 (17 Mei 1991) membentuk hubungan antara Badan Pembangunan Daerah ARMM dan Badan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan Nasional (NEDA). Undang-undang Republik No. 9054 (13 Maret 2001) memperkuat RA 6734, tindakan organik yang menciptakan ARMM. Pemerintah Daerah Otonomi Daerah di Mindanao (ARMM) bertanggung jawab atas tata pemerintahan yang baik dan pengembangan semua unit penyusun di Daerah Otonom yang sesuai dengan kebijakan konstitusional yang dinyatakan mengenai otonomi daerah dan daerah dan desentralisasi tanpa mengurangi kewenangan dan fungsi yang telah dinikmati oleh unit pemerintah daerah di wilayah ini.

ARMM adalah daerah otonom Filipina, yang terletak di kelompok pulau Mindanao di Filipina, yang terdiri dari lima provinsi berpenduduk mayoritas Muslim: Basilan (kecuali Kota Isabela), Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi. ARMM sebelumnya termasuk provinsi Shariff Kabunsuan sampai 16 Juli 2008, ketika Shariff Kabunsuan tidak lagi ada sebagai provinsi setelah Mahkamah Agung Filipina mengumumkan "Undang-Undang Otonomi Mindanao Muslim 201", yang dianggap inkonstitusional dalam *Sema vs COMELEC*. Pada tanggal 7 Oktober 2012, Presiden Benigno Aquino III mengatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk memiliki kedamaian di wilayah otonomi dan akan dikenal sebagai Daerah Otonom Bangsamoro, sebuah gabungan negara (bangsa) dan Moro. ARMM mencakup dua wilayah geografis: Lanao del Sur dan Maguindanao (kecuali Kota Cotabato) di Mindanao barat daya, dan provinsi pulau Basilan (kecuali Kota Isabela), Sulu dan Tawi-Tawi di Kepulauan Sulu. Wilayah ini mencakup total 12.288 km²

Untuk sebagian besar sejarah Filipina, wilayah dan sebagian besar Mindanao telah menjadi wilayah terpisah, yang memungkinkannya berkembang budaya dan identitasnya sendiri. Wilayahnya sudah tradisional tanah air Muslim Filipina sejak abad ke 15, bahkan sebelumnya kedatangan orang Spanyol yang mulai menjajah sebagian besar Filipina pada tahun 1565. Misionaris Muslim tiba di Tawi-Tawi di 1380 dan memulai konversi penduduk asli ke Islam. Di 1457, Kesultanan Sulu didirikan, dan tidak lama kemudian kesultanan Maguindanao dan Buayan juga didirikan. Pada saat sebagian besar Filipina melanggar peraturan porsinya, kesultanan ini mempertahankan kemerdekaan mereka dan secara teratur menantang dominasi Spanyol di Filipina dengan melakukan penggerebekan di kota-kota pesisir Spanyol di Indonesia bagian utara dan menolak serangan berulang Spanyol di wilayah mereka. Tidak sampai kuartal terakhir abad ke 19 bahwa Kesultanan Indonesia Sulu secara formal mengakui kekuasaan Spanyol, namun wilayah-wilayah ini tetap dikendalikan secara longgar oleh orang Spanyol karena kedaulatan mereka terbatas stasiun militer dan garnisun dan kantong permukiman sipil di Zamboanga dan Cotabato, sampai mereka harus meninggalkan wilayah

tersebut sebagai konsekuensi dari kekalahan mereka dalam Perang Spanyol-Amerika.

Pada 1970-an, meningkatnya permusuhan antara pasukan pemerintah dan Front Pembebasan Nasional Moro mendorong Ferdinand Marcos untuk mengeluarkan proklamasi yang membentuk Daerah Otonom di Filipina Selatan. Namun ini ditolak oleh seorang plebisit. Pada tahun 1979, Batas Pambansa No. 20 menciptakan Pemerintahan Otonomi Daerah di wilayah Mindanao Barat dan Tengah.

Undang-undang baru, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9054, disahkan oleh Kongres pada tanggal 7 Februari 2001 dengan maksud untuk memperluas wilayah dan kekuasaan ARMM dengan mengubah Undang-Undang Organik asli (R.A. No. 6734) dan meminta plebisit untuk meratifikasi amandemen tersebut dan mengkonfirmasi yang mana yang lain. Provinsi dan kota ingin bergabung dengan daerah ini. RA 9054 mengalami kematian politik menjadi undang-undang pada tanggal 31 Maret 2001, tanpa tanda tangan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Sebuah plebisit diadakan pada tanggal 14 Agustus di provinsi Basilan, Cotabato, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Palawan, Sarangani, Cotabato Selatan, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur dan Zamboanga Sibugay, dan kota-kota Cotabato, Dapitan, Dipolog, General Santos, Iligan, Kidapawan, Marawi, Pagadian, Puerto Princesa, Digos, Koronadal, Tacurong dan Zamboanga. Dalam plebisit, mayoritas suara yang diberikan di empat provinsi asli mendukung amandemen; Di luar daerah ini, hanya Marawi dan provinsi Basilan (tidak termasuk Kota Isabela) yang memilih untuk disertakan dalam ARMM.

Provinsi keenam ARMM, Shariff Kabunsuan, dipahat dari Maguindanao pada tanggal 28 Oktober 2006. Namun, pada tanggal 16 Juli 2008, Mahkamah Agung Filipina membatalkan penciptaan Shariff Kabunsuan, menyatakan inkonstitusional Bagian 19 di RA 9054 yang diberikan Majelis Regional ARMM memiliki kekuatan untuk menciptakan provinsi dan kota. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa hanya Kongres Filipina saja diberdayakan untuk menciptakan provinsi dan kota karena terciptanya semacam itu termasuk daya untuk menciptakan daerah legislatif, yang secara eksplisit di bawah Konstitusi Filipina berada dalam satu-satunya hak prerogatif Kongres untuk ditetapkan.

Pada 18 Juli 2008, Hermogenes Esperon, penasihat perdamaian mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, dalam pembicaraannya dengan Moro Islamic Liberation Front di Malaysia, mengungkapkan rencana perluasan wilayah tersebut. [19] Kesepakatan tersebut, dinegosiasikan dalam pembicaraan rahasia dengan MILF dan dengan persetujuan, akan memberikan kontrol ARMM terhadap 712 desa tambahan di bagian selatan Mindanao, serta lebih luas kekuatan politik dan ekonomi.

Pada tanggal 4 Agustus 2008, setelah pejabat setempat dari Cotabato meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan penandatanganan kesepakatan antara GRP dan MILF, Mahkamah mengeluarkan Perintah Penahanan Sementara terhadap penandatanganan Memorandum Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD) antara pemerintah Filipina dan pemberontak MILF di Malaysia. Beberapa anggota parlemen mengajukan permohonan agar Mahkamah Agung berhenti pemerintah Filipina mengakhiri MOA-AD karena kurangnya transparansi dan kegagalan MILF untuk memutuskan hubungan dengan al-Qaeda-linked jaringan teroris Jemaah Islamiyah, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara pan-Islam di Asia Tenggara menggunakan kamp MILF di barat selatan Mindanao sebagai tempat latihan dan pementasan poin untuk serangan.

Pada tanggal 14 Oktober 2008, Mahkamah Agung Filipina, dengan pemungutan suara 8-7, menyatakan "bertentangan dengan hukum dan Konstitusi" tentang Leluhur Aspek Domain (MOA-AD) Perjanjian Tripoli tentang Perdamaian tahun 2001 antara Pemerintah Republik Filipina (GRP) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Keputusan 89 halaman tersebut, yang ditulis oleh Associate Justice Conchita Carpio-Morales memutuskan: "Singkatnya, Penasehat Presiden mengenai Proses Perdamaian melakukan

penyalahgunaan wewenang yang serius saat dia gagal melaksanakan konsultasi yang bersangkutan proses, seperti yang diamanatkan oleh EO No. 3, RA 7160, dan RA 8371. Proses sembunyi-sembunyi dimana MOA-AD dirancang dan dibuat berjalan bertentangan ke dan lebih dari otoritas hukum, dan merupakan tindakan yang aneh, berubah-ubah, menindas, sewenang-wenang dan lalim. Ini menggambarkan penghindaran kotor tugas positif dan penolakan virtual untuk melakukan tugas yang diperintahkan.

Karena kegagalan mendirikan badan Bangsamoro dalam pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, Walikota Rodrigo Duterte di Pidato kampanyenya mengumumkan niatnya untuk membentuk pemerintahan federal yang akan menggantikan bentuk pemerintahan kesatuan. Dia memenangkan pemungutan suara 2016. Dalam rencananya, ARMM, bersama dengan daerah yang memilih untuk dimasukkan dalam ARMM pada tahun 2001 ditambah Kota Isabela dan Cotabato City, akan menjadi bagian dari sebuah negara federal. Aquilino Pimentel Jr., sekutu Duterte dan advokat untuk federalisme di Filipina, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa 2001 perluasan ARMM.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Bangsamoro *Basic Law* Sebagai Hukum Dasar

Bangsamoro Basic Law merupakan Hukum Dasar Bangsamoro, yang sering disebut dengan akronim "BBL" (Filipino: *Batayang Batas untuk Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro*), adalah sebuah undang-undang yang disinggung oleh Kongres ke-16 di Filipina yang berusaha untuk membentuk sebuah otonomi baru yang diusulkan entitas politik yang dikenal sebagai Daerah Otonom Bangsamoro, menggantikan Daerah Otonomi saat ini di Mindanao Muslim (ARMM). Sebagai tindakan organik, Undang-Undang Dasar akan menyediakan struktur dasar pemerintahan untuk Daerah Otonom

Bangsamoro, dan memberlakukan kesepakatan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Komprehensif mengenai Bangsamoro, yang merupakan kesepakatan damai yang ditandatangani antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014.

Bangsamoro *people* adalah mereka yang pada saat penaklukan dan kolonisasi dianggap penduduk asli atau penduduk asli Mindanao dan kepulauan Sulu dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Palawan, dan pasangan mereka, dan keturunan mereka. (Bagian 1 BBL). Entitas pemerintah Filipina, seperti Bangsamoro diberi wewenang untuk memiliki bendera sendiri berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 8491, atau dikenal sebagai Bendera dan Kode Heraldik Filipina.

Wilayah Bangsamoro terdiri dari wilayah daratan, maritim, terestrial, alluvial dan udara. Bagian 1 secara tegas menyatakan bahwa wilayah Bangsamoro tetap menjadi bagian dari Filipina. Begitupun, rancangan Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa Bangsamoro harus menghormati dan mematuhi perjanjian dan kesepakatan internasional Filipina. Dengan demikian, apapun kekuatan yang dapat diterapkan Bangsamoro di wilayahnya harus konsisten dan tidak bertentangan dengan kewajiban dan komitmen internasional negara tersebut. (Pasal IV, Bagian 8 BBL). Unit pemerintah daerah yang akan terdiri dari wilayah Bangsamoro akan ditentukan melalui plebisit untuk ratifikasi Undang-undang Dasar ini (Pasal XV, Bagian 3 BBL).

Muatan Ketentuan dalam Bangsamoro Basic Law terdiri dari (1) Ketentuan Umum; (2) Identitas Bangsamoro; (3) Wilayah Bangsamoro; (4) Otonomi Politik dan Pemerintahan Bangsamoro; (5) Hubungan antar-pemerintah; (6) Sistem Keadilan Bangsamoro; (7) Ketertiban umum dan keamanan; (8) Otonomi Fiskal; (9) Ekonomi dan Patrimoni; (10) Sumber daya alam; (11) Rincian plebisit yang akan mengarah pada ratifikasi BBL; (12) Rincian Otoritas Transisi Bangsamoro yang akan disiapkan untuk sementara.

Hak-hak dasar adalah yang dijamin oleh Pemerintah Bangsamoro kepada konstituennya. Ini termasuk yang sudah dinikmati oleh semua warga Filipina serta hak untuk mengejar aspirasi politik secara demokratis; hak perempuan terhadap partisipasi politik dan perlindungan yang berarti dari segala bentuk kekerasan; hak untuk bebas dari pelecehan agama, etnis dan sektarian; dan hak untuk mendapatkan pendidikan umum gratis di tingkat SD dan SMA. (Bagian 1). Berdasarkan draf Undang-Undang Dasar, semua undang-undang dan kebijakan diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Hak-hak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya dijamin oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro. (Seksi 2)

Pada BBL ini juga memberikan pengaturan atas keberadaan Komisi Pelestarian Warisan Budaya Bangsamoro (BCPHP), yang dibuat untuk melestarikan budaya, kesenian dan tradisi Bangsamoro melalui pengelolaan situs budaya dan sejarah, dan pendirian perpustakaan dan museum. Tanggung jawab utamanya meliputi penulisan sejarah orang-orang Bangsamoro dan membangun dan mempertahankan institusi budaya, program dan proyek di area komponen Bangsamoro. (Bagian 19 sampai 21)

Hak atas kesehatan dipromosikan melalui penyampaian layanan kesehatan komprehensif dan terpadu dan dukungan bagi penyandang disabilitas. (Pasal IX, Bagian 15 dan 16). Mekanisme peradilan transisional dikenal dalam BBL yang merupakan mekanisme untuk mengatasi keluhan orang-orang Bangsamoro, seperti ketidakadilan historis, pelanggaran hak asasi manusia, peminggiran melalui pemalsuan hak dan hak kepemilikan tanah dan hak adat mereka secara tidak adil. (Bagian 4).

Hak partisipasi politik sektor di Bangsamoro dipromosikan. Ketersediaan kursi untuk IP, wanita, dan sektor lainnya harus dialokasikan ke

majelis dan menteri Bangsamoro yang bertanggung jawab untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan mereka dapat ditunjuk. (Bagian 5, 11)

Rancangan Undang-Undang Dasar mengakui hak-hak IP / ICC sebagai berikut: (1) Hak atas nama asli dan / atau fusaka; (Pasal IX, Bagian 5); (2) Hak istimewa untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya alam di dalam area yang dilindungi oleh judul asli mereka. Jika kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Bangsamoro, atau pemegang konsesi resmi, informed consent dari pemegang kartu asli secara gratis dan sebelumnya harus diminta; (Pasal XIII, Bagian 12); (3) Hak atas pemasukan yang adil atas pendapatan dari eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam wilayah yang dicakup oleh judul asli mereka. Parlemen Bangsamoro akan memberlakukan undang-undang untuk tujuan ini; (Pasal XII, Bagian 34; Pasal XIII, Bagian 12); (4) Hak partisipasi politik, termasuk kursi yang dipesan untuk IP / ICC non-Moro di Parlemen Bangsamoro. Kursi harus diisi sesuai dengan hukum kebiasaan dan proses pribumi mereka. (Pasal VII, Bagian 6); (5) Hak atas pendidikan melalui pembentukan sistem universitas kesukuan yang akan memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat adat yang lebih tinggi di wilayah ini; (Pasal IX, Bagian 14); (6) Pengakuan sistem peradilan tradisional / kesukuan. Parlemen Bangsamoro akan memberlakukan undang-undang untuk tujuan ini, dan sebuah Kantor Sistem Peradilan Tradisional / Tribal juga harus dibuat. (Pasal X, Bagian 23, 24); (7) Pengakuan struktur adat, atau sistem yang mempromosikan perdamaian, hukum dan ketertiban; (Pasal XI, Bagian 18); (8) Hak-hak lain yang diberikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Pasal IX, Bagian 5) Rancangan Undang-Undang Dasar juga mengamanatkan pembentukan kantor untuk IP / ICC di Bangsamoro, yang kepalanya harus secara otomatis menjadi anggota kabinet. (Pasal V, Bagian 3 (30))

Sistem Keadilan Bangsamoro (Bangsamoro Justice System) dalam BBL sangat otonom dan nyaris menyerupai negara federal. Hubungan antara sistem syari'ah dan keadilan nasional.

Secara eksplisit, Rancangan Undang-Undang Dasar, hukum Syariah hanya berlaku atas orang-orang Muslim saja, dan tidak ada yang beroperasi dengan prasangka non-Muslim dan masyarakat non-pribumi. Harus ada kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Nasional mengenai sistem peradilan Syari'ah (Bagian 1.2). Sistem peradilan nasional akan tetap utuh untuk semua hal di luar yurisdiksi (hal-hal yang tidak disebutkan dalam Bagian 5 sampai 7) Pengadilan Syari'ah, dan kekuatan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (untuk meninjau setiap penyalahgunaan wewenang pidana sebesar kekurangan atau kelebihan yurisdiksi oleh Pengadilan Syari'ah) di bawah Art. VIII, Sec. 1 dari Konstitusi, dan Aturan 65 dari Aturan Pengadilan, tidak akan terpengaruh.

Pengadilan Syari'ah di Bangsamoro, selain yurisdiksinya atas hubungan pribadi dan properti berdasarkan Keputusan Presiden No. 1083, atau dikenal sebagai Kode Etik Hukum Muslim, memiliki yurisdiksi atas hukum komersial dan pidana Syari'ah yang diberlakukan oleh Bangsamoro Parlemen. (Bagian 2, 3). Distrik Syari'ah, Sirkuit, dan Pengadilan Tinggi akan memiliki yurisdiksi atas hal-hal yang disebutkan di bawah Bagian 5, 6, dan 7.

Parlemen Bangsamoro dapat memberlakukan undang-undang komersial dan kriminal, dan hal ini benar-benar diakui oleh Pengadilan Shar'iah. Pada Persetujuan Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB) (III, 5) mengatur perluasan yurisdiksi pengadilan Syari'ah dalam draf Undang-undang Dasar. Selain itu, bahkan jika Parlemen Bangsamoro dapat memberlakukan undang-undang komersial dan kriminal [di samping "hubungan pribadi, keluarga, dan properti"], undang-undang ini harus "tunduk pada Konstitusi dan undang-undang nasional." Dengan demikian, harus disebutkan bahwa Sec. 5 dari RA 9054 (Undang-undang Organik ARMM), telah menetapkan bahwa Pengadilan Syari'ah memiliki yurisdiksi atas kasus kriminal dan komersial yang melibatkan umat Islam. Adapun hukum pidana, rancangan Undang-Undang Dasar mengatur bahwa undang-undang tersebut hanya berlaku di wilayah Bangsamoro dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. (Bagian 3)

Lembaga peradilan yang didirikan berdasarkan draf BBL terdiri dari: (1) Suatu **Distrik Syari'ah, dan Pengadilan Sirkuit, dan Pengadilan Tinggi Syari'ah**. (Bagian 5 sampai 7) Hakim / Hakim Pengadilan Syariah harus memiliki kualifikasi yang tercantum dalam Bagian 9, dan mereka akan ditunjuk oleh Presiden melalui mekanisme yang sama seperti hakim / hakim pengadilan reguler [kecuali untuk rekomendasi tambahan kekuatan yang diberikan kepada Dewan Yudikatif dan Dewan Syari'ah (JBC) untuk pertimbangan JBC nasional (Bagian 10)]. (2) **Syari'ah JBC** akan merekomendasikan pelamar kepada JBC nasional untuk posisi hakim / hakim di pengadilan Syari'ah di Bangsamoro. Sebagai tambahan, seorang konsultan untuk JBC nasional akan ditunjuk untuk menasihatinya mengenai pengangkatan ke pengadilan Syari'ah di Bangsamoro. Kekuasaan di sini hanyalah sekedar rekomendasi dan tidak menggantikan otoritas JBC nasional. Shari'ah JBC terdiri dari lima (5) anggota sebagaimana diatur dalam Bagian 12. Hal ini dapat melakukan penyelidikan atas kesalahan personil di pengadilan Syari'ah di Bangsamoro, dan menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Mahkamah Agung untuk yang terakhir tindakan. (Bagian 10 sampai 13). (3) **Layanan Kejaksaan Syariah** akan menjadi bagian dari Kejaksaan Nasional di bawah Departemen Kehakiman. (Bagian 19); (4) **Akademi Syari'ah** akan melakukan kursus dan pelatihan tentang praktik hukum Syariah di Bangsamoro, menilai kursus dan gelar Syariah yang diperoleh Bangsamoro dari sekolah dan universitas di luar negeri, dan mengembangkan kurikulum sekolah dan universitas di Bangsamoro. (Bagian 20).; (5) **Sistem peradilan tradisional / kesukuan** dibuat oleh Parlemen Bangsamoro. Selanjutnya, Kantor Sistem Peradilan Tradisional / Tribal harus dibuat yang bertanggung jawab dalam mengawasi studi, pelestarian dan pengembangan sistem peradilan kesukuan di dalam Bangsamoro. (Bagian 23, 24)

Rancangan Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa Pemerintah Bangsamoro akan memiliki bentuk pemerintahan parlementer. Bentuk pemerintahan ini sesuai dengan konstitusi negara dan bersifat parlementer demokratis. Sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan dimana

eksekutif dibentuk oleh badan legislatif, yaitu Chief Executive (yang adalah kepala eksekutif) yang dipilih oleh legislatif. Karena itu, Chief Executive secara tidak langsung terpilih. Demokrasi, adalah sistem pemerintahan yang mendapatkan legitimasinya dari masyarakat. Oleh karena itu, warga negara yang memenuhi syarat berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, dalam pemilihan wakil mereka di pemerintahan.

Di bawah rancangan Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Bangsamoro demokratis karena semua anggota Parlemen akan dipilih sebagai wakil Rakyat Bangsamoro. Konsisten dengan Konstitusi, baik eksekutif maupun legislatif dalam sistem parlementer harus dipilih dan mewakili unit politik konstituennya. (Lihat pasal VII BBL)

Konstitusi menyerahkannya pada kebijaksanaan Kongres untuk menentukan struktur pemerintahan yang tepat bagi unit pemerintah daerah dan daerah otonom. Secara khusus, Pasal 18, Pasal X Konstitusi 1987 menetapkan bahwa Undang-undang Organik (Undang-undang Dasar dalam Kasus Bangsamoro) untuk Daerah Otonom "harus menentukan struktur dasar pemerintahan yang terdiri dari departemen eksekutif dan dewan legislatif."

Hubungan antara Pemerintah Nasional dan Bangsamoro. Hubungan antara Pemerintah Nasional dan Bangsamoro harus asimetris. Ini asimetris karena berbeda dengan hubungan antara Pemerintah Nasional dan unit pemerintah daerah lainnya. Secara khusus, Konstitusi (Pasal X, Sek, 20) menganugerahkan Pemerintahan Bangsamoro, sebagai daerah otonom, dengan kekuasaan legislatif mengenai masalah administratif organisasi, dan wilayah leluhur-yang tidak diberikan kepada unit pemerintah daerah. Namun, mirip dengan unit pemerintah daerah, kekuatan pengawasan umum Presiden tetap ada. (Bagian 1.3).

Mekanisme Hubungan Antar Pemerintah Pusat dengan Badan Hubungan Antar Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangsamoro dibentuk untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul sehubungan

dengan pelaksanaan di Bangsamoro dari masing-masing kekuasaan Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro, melalui konsultasi dan negosiasi lanjutan dalam non-adversarial cara. Semua masalah yang belum terselesaikan harus diangkat ke Presiden, melalui Kepala Menteri. (Bagian 4 BBL). Rancangan Undang-Undang Dasar juga mengatur Kongres Filipina - Forum Parlemen Bangsamoro untuk tujuan kerja sama dan koordinasi inisiatif legislatif. (Bagian 8 BBL).

Hubungan antara Pemerintah Bangsamoro dan unit penyusun pemerintah daerahnya, dilakukan dengan menerima konsep devolusi yang diilhami oleh prinsip subsidiaritas. Provinsi, kota, kotamadya, barangay, dan wilayah geografis di dalam wilayahnya adalah unit penyusun Bangsamoro. Hak istimewa yang telah dinikmati oleh unit pemerintah daerah di dalam Bangsamoro berdasarkan undang-undang yang ada tidak akan berkurang kecuali jika tidak diubah, dimodifikasi atau direformasi untuk tata pemerintahan yang baik. (Bagian 6,7 BBL). Untuk memastikan kerja sama dan kohesi antara Pemerintah Bangsamoro dan LGU penyusunnya, Dewan Pemimpin juga harus dibentuk. (Bagian 5 BBL).

Pemerintah Nasional tidak memberikan preferensi lebih besar kepada Bangsamoro untuk posisi di Kantor Nasional. Meskipun, akan menjadi kebijakan Pemerintah Nasional untuk menunjuk penduduk Bangsamoro yang kompeten dan berkualitas di beberapa kantor Pemerintah Nasional [sekurang-kurangnya satu (1) Sekretaris Kabinet; setidaknya satu (1) di masing-masing departemen, kantor dan biro lain, memegang posisi eksekutif, terutama rahasia, sangat teknis, menentukan kebijakan; dan satu (1) Komisaris di masing-masing badan konstitusional (Pasal VI, Bagian 9), sekurang-kurangnya satu (1) peradilan di Mahkamah Agung; dan dua (2) hakim di Pengadilan Banding (Pasal X, Bagian 27)] hal ini tidak menghilangkan kebijaksanaan Presiden untuk menunjuk orang-orang yang berkualifikasi dari sektor lain.

Badan-badan yang dibentuk melalui BBL dan mekanisme kerja antar badan. Dalam Rancangan Undang-Undang Dasar, dimungkinkan untuk

menciptakan kantor Bangsamoro yang menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan hak-hak tersebut di dalam badan-badan konstitusional.

1. **Badan Auditing Bangsamoro** yang harus mengaudit tanggung jawab atas dana publik yang digunakan oleh Pemerintah Bangsamoro, tanpa mengurangi kewenangan, wewenang dan tugas Komisi Audit nasional untuk memeriksa, mengaudit dan menyelesaikan semua akun, yang berkaitan dengan pendapatan dan penggunaan dana dan harta benda yang dimiliki dan dipercaya oleh instansi pemerintah, termasuk GOCC; (Pasal V, Bagian 2 (7) BBL)
2. **Kantor Pelayanan Sipil Bangsamoro** yang akan mengembangkan dan mengelola pegawai dan petugas pemerintah Bangsamoro, tanpa mengurangi kewenangan Komisi Sipil; (Pasal V, Bagian 2 (8) BBL)
3. **Kantor Pemilu Bangsamoro** yang menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum; (Pasal VII, Bagian 9 BBL)
4. **Polisi Bangsamoro** yang menjadi bagian dari Kepolisian Nasional Filipina; (Pasal XVI, Bagian 2 BBL)
5. **Komisi Hak Asasi Manusia Bangsamoro (BCHR)** yang memiliki wewenang investigasi dan penuntutan. Dalam pelaksanaan fungsinya, BCHR dapat berkoordinasi dengan Komisi Hak Asasi Manusia; (Pasal IX, Bagian 7 BBL)
6. **Badan Kepolisian Daerah Bangsamoro** yang menjadi bagian NAPOLCOM dan akan melaksanakan fungsi NAPOLCOM di wilayahnya (Pasal XVI, Bagian 5.6 BBL).

Ruang Lingkup Kekuasaan atas sistem keuangan dan perbankan di Bangsamoro:

Tanpa mengurangi kewenangan pengawasan *Bangko Sentral ng Pilipinas*, Pemerintah Bangsamoro akan mendorong pengembangan Perbankan Syariah. Di bawah rancangan Undang-Undang Dasar, dewan pengawas syariah dapat dibuat khusus untuk tujuan ini. Menjelang akhir ini, Pemerintah Bangsamoro

juga berwenang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Al-Amanah Islamic Investment Bank. (Pasal V, Bagian 3 (13); Pasal XII, Bagian 30, 36 BBL).

Kekuasaan **Atas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.** dalam Rancangan Undang-Undang Dasar memungkinkan Pemerintah Bangsamoro memiliki kekuatan untuk mengatur fasilitas pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi di Bangsamoro yang tidak terhubung ke Kotak. Dengan kewenangan ini, diupayakan agar Pemerintah Bangsamoro dapat memacu pembentukan pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik lainnya di wilayah yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan penduduk Bangsamoro. (Bagian 3 (15) BBL).

Kekuasaan **Untuk menciptakan, membagi, menggabungkan, menghapus atau secara substansial mengubah batas-batas unit pemerintah daerah.** Kekuatan untuk menciptakan, membagi, menggabungkan, menghapus atau secara substansial mengubah batas-batas unit pemerintah daerah yang diberikan kepada Parlemen Bangsamoro konsisten dengan kekuasaan yang diberikan kepada unit pemerintah daerah lainnya di Bagian 6 sampai 10 Bab II, Judul I dari Daerah Kode Pemerintah tahun 1991 dan juga tunduk pada batasan yang diberikan oleh Konstitusi.

Otoritas Transisi Bangsamoro hampir sama konsepnya dengan KPA (Komite Peralihan Aceh) di Aceh pasca konflik tahun 2005. Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) berfungsi sebagai pemerintahan sementara Bangsamoro selama periode ini, dan menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif untuk tujuan ini. (Bagian 2 dan 3). BTA harus beroperasi sesuai dengan rancangan Undang-Undang Dasar, dan Rencana Transisi yang akan dibuat oleh mereka. Kepala Menteri sementara akan menyiapkan dan mengajukan Rencana Transisi dalam waktu enam puluh hari sejak pengesahan draft Undang-Undang Dasar untuk disetujui oleh BTA lainnya. Selanjutnya, BTA akan bertindak atau menyetujui Rencana Transisi dalam waktu sepuluh hari setelah diserahkan. Rencana Transisi akan dilaksanakan dalam waktu lima belas hari sejak disetujui oleh BTA.

Berdasarkan draf Undang-Undang Dasar, Presiden diberi wewenang untuk menunjuk kelima puluh anggota BTA tersebut. Yang akan menjadi anggota adalah: Front Pembebasan Islam Moro akan memimpin BTA. Pada saat yang sama, ada beberapa perlindungan untuk memastikan bahwa komposisi BTA bersifat representatif dan inklusif. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa IP / ICC non-Moro, perempuan, masyarakat pemukim, dan sektor lainnya harus diwakili dalam BTA. Selanjutnya, proses pengangkatan memungkinkan pengajuan nominasi ke Kantor Presiden. (Seksi 2)

Semua karyawan yang terkena dampak bertahap ARMM dan kantor regional lembaga pemerintah nasional dapat diserap, dipindahkan, atau dipisahkan dari layanan. Pembayaran pemutusan, dan tunjangan lainnya yang harus dibayar berdasarkan undang-undang harus dibayarkan kepada pegawai yang terkena dampak ini oleh Pemerintah Nasional. (Bagian 9.10). Secara khusus mengenai pegawai Pemerintah ARMM, pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah ARMM akan terus menjalankan fungsinya selama fase awal. Penyerapan atau penempatan kembali pegawai Pemerintah ARMM harus sesuai dengan proses penempatan dan perekrutan yang ditetapkan oleh BTA.

4. KESIMPULAN

Diawali oleh berbagai konflik yang terjadi di Filipina, dewasa ini terorisme menjadi ancaman nyata di perairan Filipina selatan. Kelompok Abu Sayyaf merupakan gerakan separatis yang lahir dari sejarah konflik di Filipina. Kelompok Abu Sayyaf merupakan salah satu gerakan yang lahir di Basilan. Kelahiran kelompok ini di tandai dengan mulai terpecahnya gerakan MNLF, yang mana Abdurajak Janjalani yang tidak sepakat dengan cara-cara diplomasi yang dilakukan oleh Nur Misuari selaku pimpinan MNLF dikala itu. Untuk mencapai cita-citanya yakni mendirikan sebuah negara Islam di Filipina Selatan. Kelompok Abu Sayyaf melakukan perlawanan dengan cara kekerasan.

Kelompok Abu Sayyaf melakukan pemboman, penculikan, dan pengeksekusian terhadap sandera. Gerakan Kelompok Abu sayyaf ini terlihat dengan jelas sebagai sebuah gerakan yang mengakibatkan adanya sebuah konflik antar agama, dilain faktor politik yang awalnya diperjuangkan oleh Abdurajak Janjalani.

Walaupun gerakan Kelompok Abu sayyaf terbilang kecil, tetapi kelompok ini telah berhasil menguncang kestabilan negara Filipina dengan melakukan pengeboman-pengeboman di daerah-daerah Filipina. Konflik yang diusung oleh gerakan ini memang konflik antar agama, dimana kristen sebagai mayoritas dan Islam sebagai minoritas. Kelompok Abu sayyaf berjuang untuk membebaskan umat Muslim Moro dari penjajahan orang-orang Kristen, karena bila dilihat dari sejarahnya, Filipina pernah menjadi sebuah negara kesultanan Islam Sulu yang pernah Jaya di negara tersebut. Faktor inilah yang menjadi dasar dari orang-orang Moro melakukan perjuangan untuk membebaskan diri dari negara Filipina,

Perkembangan selanjutnya, dikarenakan telah banyaknya orang-orang Kristen yang tinggal di pulau Mindanao Selatan dan mengakibatkan tersingkirnya orang-orang Muslim dari pulau ini ke daerah-daerah pesisir dari pulau ini. Karena merasa tersingkirkan, Kelompok Abu sayyaf berusaha untuk membebaskan daerah ini dengan memusuhi orang-orang Kristen dengan cara meneror mereka dengan melakukan kekerasan. Eksistensi dari kelompok Abu Sayyaf, didukung oleh bantuan dari luar Filipina. Al-Qaeda yang merupakan sebuah jaringan teroris internasional telah banyak membantu kelompok Abu sayyaf dalam hal financial. Al-Qaeda membantu Abu Sayyaf dalam rangka memperluas jaringannya. Segala keperluan Abu Sayyaf menyangkut persenjataan semuanya di danai oleh al-Qaeda. Diluar itu semua kelompok Abu Sayyaf juga mendapatkan dana dari uang tebusan sandera.

Hingga saat ini keberadaan Kelompok Abu Sayyaf tetap ada di Filipina, berusaha mendirikan negara Islam adalah cita-cita mereka. Solusi telah banyak ditawarkan oleh pemerintah Filipina, tetapi kelompok ini tidak dapat

menerima cara-cara damai dan lebih memilih perang. Pemerintah Filipina dan Amerika telah berusaha untuk melakukan penghentian terhadap gerakan ini namun kelompok ini tetaplah sulit untuk dimusnahkan, karena mereka melakukan cara-cara geriliya dalam gerakannya.

Abu Sayyaf adalah suatu gerakan yang bersifat radikal, dimana gerakan ini selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Gerakan Abu Sayyaf di Filipina ini telah sangat meresahkan warga Filipina dengan aksi-aksi pengeboman, penculikan dan pengeksekusian terhadap sandera. Gerakan Abu Sayyaf ini telah mengarah ke taraf terorisme. Kelompok Abu Sayyaf pertama muncul pada tahun 1989 di bawah kepemimpinan Abdurajak Janjalani, ia pernah menempuh jenjang pendidikan di Universitas Ummul Qura di Mekkah selama 3 tahun. Ia kemudian kembali ke Basilan dan Zamboanga Filipina untuk memulai berdakwah pada tahun 1984.

Pada 1987 dia mengunjungi Libya dan kemudian melanjutkan bersama Mujahiddin dan melawan Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan. Abu Sayyaf telah memiliki hubungan dengan sebuah gerakan fundamentalis Islam, Allislamic Tabligh, di tahun 1980. Kelompok dibawah pimpinan Janjalani sedang menjalankan sebuah pembentukan negara *Islamic Theocratic State of Mindanao* (MIS), dan memasukan sebuah kepercayaan agama yang meneriakkan intoleransi dengan tujuan untuk menyebarkan Islam melalui Jihad dan yang menjadi target sasarannya semua umat Kristen Filipina. Dalam pencarian objeknya, kelompok Abu Sayyaf telah menetapkan ideologinya dengan tegas dan agenda operasional yang telah mendalam terikat pada sebuah maksud usaha pengabungan yang memaksa dominasi Islam dunia melalui perlawanan bersenjata. Kelompok Abu Sayyaf sangatlah kecil dan merupakan kelompok separatis Islam yang sangat radikal di Filipina Selatan. Mereka menggunakan pemboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara Islam yang merdeka di Mindanao bagian Barat dan daerah Sulu, dimana daerah Filipina Selatan merupakan populasi tertinggi umat Muslim tinggal.

Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum syariah Islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara, dan kemudian hukum syariah tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Rommel Banlaoi kemudian memberikan penjelasan mengenai “Empat Dasar Kebenaran” yang diterbitkan oleh Abdurajak Janjalani pada tahun 1993-1994 sebagai panduan dasar bagi kelompok Abu Sayyaf (1) Tujuan kelompok Abu Sayyaf tidak untuk membangun atau mempromosikan faksi dan perpecahan dalam perjuangan kelompok muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjadi jembatan antara pasukan revolusioner baik dari MNLF dan MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan, (2) Tujuan strategis utama Abu Sayyaf adalah pembentukan sebuah negara Islam murni yang “sifat, makna, lambang dan tujuannya” identik dengan kedamaian. Kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa mereka akan menghormati kebebasan beragama, bahkan dalam konteks sebuah negara Islam, mereka menyatakan “hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam”. (3) Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi “penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang” terhadap umat Muslim. (4) Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua di bawah naungan hukum Quran dan Sunnah yang murni.

Selain itu juga kelompok Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi. Ketidakadilan dan perampasan ekonomi dari Bangsamoro. Dalam pernyataan publik yang diterbitkan pada November 1994, kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa perjuangannya adalah untuk mencari keadilan bagi Bangsamoro. Dalam salah satu pernyataan ideologisnya pada khutbahnya, Abdurajak Janjalani menekankan bahwa “tujuan awal dalam upaya penegakan keadilan akan berakhir pada sebuah tuntutan untuk

mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi muslim Bangsamoro”.

Suatu kelompok atau organisasi yang telah terbentuk, untuk mengembangkan dirinya, maka di perlukanlah anggota, perekrutan anggota adalah suatu persyaratan terpenting untuk sebuah kelangsungan sebuah organisasi. Suatu kelompok membutuhkan anggota-anggota baru untuk menumbuhkan kekuatan dan melengkapi dari kehilangan setiap anggota. Pada awalnya perekrutan anggota dari gerakan Abu Sayyaf diambil dari para pemuda Muslim yang tidak sejalan dengan kebijakan MNLF. Pada awal pembentukannya, kelompok ini hanya berkisar 500 orang. Walaupun hanya sedikit tetapi gerakan ini berhasil mengguncang kedaulatan negara Filipina dengan melakukan aksi penculikan, pemboman dan pembunuhan orang-orang Kristen lokal maupun Asing. Menurut data pada tahun 2005 kelompok ini diperkirakan ada sekitar 200-300 anggota di bawah kepemimpinan Khadafi Janjalani. Menurut Eusoquito P. Manalo, berargumen bahwa, “anggota kelompok Abu Sayyaf telah direkrut terbatas pada sebuah komunitas tertentu oleh kelompok etnic linguistic dan keluarga dimana koordinasi internal yang telah difasilitasi oleh kepercayaan.” Hal ini dibuat pengelompokan yang sebenarnya mustahil dimasuki oleh agen pemerintah.

Pada September 2001, militer Filipina mengkonfirmasi secara spekulatif bahwa al-Qaeda telah menampakkan dukungan terhadap material, kepemimpinan, dan pelatihan di wilayah Mindanao. Sebagai sebuah organisasi teroris transnasional, al-Qaeda telah berkembang melalui daerah-daerah Timur Tengah, Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Selatan. Ditambah, hingga ke Asia Tenggara sebagai basis kunci dan daerah persiapan. Pada awalnya, Abu Sayyaf di danai melalui jaringan financial yang didirikan oleh Muhammad Jamal Khalifa, saudara Osama bin Laden, yang telah diutus ke Filipina pada 1991, dan mendirikan sebuah jaringan amal Islam. Khalifa adalah anggota resmi yang langsung bersentuhan ke daerah untuk basis amal Saudi, the Islamic International Relief Organization (IIRO), dukungan ini tidak hanya untuk Filipina tetapi juga kaum radikal di Indonesia, Thailand dan Taiwan.

Selain hubungan dengan al-Qaeda yang telah memberi dukungan finansial dari gerakan ini, Abu Sayyaf juga menjalin hubungan dengan JI (Jamaah Islamiyyah). Al-Qaeda diduga selain membantu dalam hal finansial, namun juga telah membantu dengan pelatihan-pelatihan militernya kepada anggota-anggota dari Kelompok Abu Sayyaf.

Militer Filipina mengatakan bahwa Abu sayyaf menerima bantuan materil dan financial dan juga latihan militer dari jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sampai tahun 1995, dan dua kelompok tersebut terus melakukan kontak. Gerakan kelompok Abu Sayyaf sering melakukan teror-teror yang telah meresahkan masyarakat, Abu Sayyaf telah melakukan penculikan, pengeboman dan aksi-aksi kekerasan lainnya dalam setiap aksinya untuk mencapai cita-cita mereka mendirikan sebuah negara theokrasi Islam.

Diketahui sampai sekarang bahwa di Filipina Selatan terdapat tiga kelompok perlawanan yang menonjol yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf Group (ASG). Ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan sebuah Negara theokrasi Islam dan pembangunan ekonomi wilayah mereka. Kelompok Abu Sayyaf yang diperkirakan lahir di Basilan (Juga tempat utama operasinya), beroperasi di propinsi sulu dan Tawi Tawi di kepulauan Sulu serta semenanjung Zamboanga. Pada bulan Maret April 2001 mereka menjadi perhatian masyarakat luas melalui operasi penculikan dan penyanderaan. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga. Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan.

Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang penggagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan.

Abdurajak Janjalani bersama kelompoknya merupakan kelompok yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan Pemerintah Filipina. Abdurajak Janjalani pada tanggal 18 Desember 1998 terbunuh dalam suatu pertempuran dengan polisi di kampung Lamitan Provinsi Basilan tetapi pendukung Abu Sayyaf tetap melanjutkan perjuangan melalui penculikan, pembajakan kapal, penyanderaan awak kapal, pemboman dan pengumpulan uang secara paksa.

Beberapa waktu terakhir kelompok ini semakin memperlebar jaringan hingga ke Malaysia dan Indonesia. Kelompok Abu Sayyaf diduga bertanggung jawab atas serangkaian aksi penyanderaan dan kekerasan serta pembunuhan dan sederet aksi kriminal terorisme dan tindak pidana lainnya. Aksi mereka memiliki tujuan mendirikan sebuah negara Islam atau negara khilafah, khususnya di daerah mindanao dan bercita-cita mendirikan negara Islam besar di semenanjung melayu yakni Indonesia dan Malaysia. Rezim maritim memiliki beberapa dimensi, salah satunya dimensi sosial-politik yang mempengaruhi sebuah tatanan lautan nasional maupun internasional. Dimensi sosial-politik diantaranya mengenai kejahatan di atas lautan. Beberapa kejahatan di atas lautan diantaranya, piracy (pembajakan), armed robbery (perompakan bersenjata), dan terorisme maritim. Sejak awal tahun 1990-an, pihak internasional telah mensinyalir bahwa Indonesia adalah target terorisme internasional. Kebenaran sinyalemen tersebut terbukti pada akhir 1990-an setelah terjadi perubahan politik di Indonesia yang diiringi atmosfer yang tidak kondusif bagi aparat keamanan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi target terorisme internasional, yaitu:

Pertama, peraturan yang masih lemah. Meskipun ada UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun perspektif undang-undang tersebut memandang terorisme dari KUHP biasa. *Kedua*, kelemahan personel. Personel keamanan, secara kuantitas maupun kualitas, belum memiliki kemampuan sesuai yang diharapkan dalam

menangani terorisme. *Ketiga*, potensi teror besar. Artinya, Indonesia menjadi tempat yang cukup mudah merekrut pelaku teroris. Bila memperhatikan profil pelaku teror di Indonesia, ada kesamaan latar belakang di antara mereka seperti berasal dari keluarga miskin, tingkat pendidikan rendah dan berasal dari daerah pedesaan, sehingga memudahkan perekrut untuk melakukan cuci otak menggunakan paham-paham keagamaan yang sempit dan dangkal.

Pejabat militer Filipina, bagaimanapun, mengakui bahwa negara tersebut memiliki jaringan intelijen negara yang sangat lemah. Seorang mantan kepala staf angkatan bersenjata, Jenderal Narciso Abaya, telah secara terang-terangan mengakui bahwa nonshade informasi intelijen menghambat kampanye antiterorisme pemerintah. Abaya percaya bahwa ada budaya di antara unit intelijen di Filipina untuk menahan informasi intelijen vital. Trennya sekarang bukan kebutuhan tahu tapi kebutuhan untuk berbagi Itulah tren yang muncul di kalangan unit intelijen di seluruh dunia.

Sebenarnya, terkadang, unit intelijen Filipina Dengan tekun menyimpan informasi intelijen mereka sendiri, jika menyatu dengan informasinya dari unit intelijen lainnya, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dari musuh. Ada juga tuduhan serius bahwa pemerintah militer dan provinsi menguasai Abu Sayyaf. Misi Perdamaian Internasional yang pergi ke Basilan pada tanggal 23-27 Maret 2002 melaporkan bahwa "ada laporan yang konsisten dan kredibel bahwa militer dan pemerintah provinsi memanjakan Abu Sayyaf. Dalam keadaan seperti itu, sebuah pendekatan militer tidak akan berhasil menyelesaikannya Masalahnya. Pada awal 1994, faktanya, ada tuduhan bahwa polisi dan polisi palsu Petugas terlibat dalam usaha ASG untuk menyelundupkan senjata api ke dalamnya Zamboanga City dari Manila dan Iloilo di atas kapal motor Princess of Pasific.

Polisi dan pihak berwenang militer bersikeras untuk membuat kelompok Abu Sayaf diam (tidak ditolerir) dan orang-orang yang terbukti bersalah akan dihukum. Komponen politik / hukum / diplomatik dari strategi pendekatan holistik memimpikan reformasi politik dan pengembangan

kelembagaan untuk memperkuat institusi demokrasi dan memberdayakan warga negara untuk mengejar pertumbuhan pribadi dan masyarakat. Komponen ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan demokrasi Filipina untuk menghadapi komunis dan ideologi fundamentalis Islam. Landasannya adalah proses berbasis pada "Enam Jalan menuju Perdamaian": (1) Mengejar reformasi sosial, ekonomi, dan politik; (2) Pembangunan konsensus dan pemberdayaan perdamaian; (3) Penyelesaian yang damai dan dinegosiasikan dengan kelompok pemberontak; (4) Program rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi; (5) Pengelolaan konflik dan perlindungan warga sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata; (6) Konstruksi dan pemeliharaan iklim yang kondusif bagi perdamaian.

Komponen sosioekonomi / psikososial pendekatan holistik, untuk bagian, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air melalui percepatan pembangunan program pemerintah Filipina. Hal ini juga mulai berkembang dan memperkuat semangat kebangsaan di kalangan masyarakat, dengan mengembangkan nasional karakter / identitas tanpa kehilangan integritas budaya. Kedamaian dan ketertiban / keamanan komponen dirancang untuk melindungi orang-orang dari pemberontak dan memberikan lingkungan yang aman untuk pembangunan nasional. Lebih penting lagi, komponen ini memiliki tujuan spesifik untuk menolak pemberontak akses ke yang terpenting dukungan sumber daya yang populer.

Akhirnya, komponen informasinya mengintegrasikan semua rekomendasi jalan keluar ekonomi, budaya dan politik. Ini "mengacu pada keseluruhan usaha untuk mengadvokasi perdamaian, mempromosikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung upaya pemerintah untuk mengatasinya pemberontakan melalui pendekatan media dan interpersonal. Aspek operasional dari pendekatan holistik bersifat dual function. Mantan Presiden Arroyo menjelaskan, "Bagaimana kita mengatasi masalah pemberontakan ini? Melalui pendekatan tangan kanan dan kiri. Tangan kanan adalah kekuatan penuh dari Hukum dan tangan kiri adalah tangan rekonsiliasi dan tangan memberi dukungan kepada saudara-saudara

kita yang paling miskin sehingga mereka tidak akan didorong untuk bergabung dengan pemberontak."

DAFTAR PUSTAKA

- McKenna, Thomas M. (1969). *Ifugao Law. With A New Foreword by Fred Eggan*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- McKenna, Thomas M. (1972). *The Kalinga of Northern Luzon, Philippines*. Holt, Rinehart and Winston, "Honor" Killings and Blood Feuds. <http://www.gendercide.org>
- "Updates on the GRP-MILF Peace Talks." Republic of the Philippines. Office of the President. Office of the Presidential Adviser on the Peace Process. GRP Peace Panel for Talks with the Moro Islamic Liberation Front, January 12, 2007.
- Abdullah Taufik, Sharon Siddique. 1989, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Amin dalam pengantar: *Dialektika Agama antara Profanitas dan Sakralitas*, dalam Moh. Shofan, *Jalan ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCioD, 2006
- Abdullah, Intuas. 1982. "Dispute Settlement Among Maranao: Case Studies of Conflict Resolution in Marawi City." Masters Thesis. Department of Anthropology. University of the Philippines, Diliman, Quezon City.
- Abdullah, Taufik, (Editor) 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abou-Zeid, Ahmed. "Honour and Shame Among The Bedouins of Egypt." In J.G. Peristiany. *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Abuza, Zachary, "Counter-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf," *Strategic Studies Institute*, 2014.
- Abuza, Zachary. 2002. *Tentacles of Terror: Al-Qaeda's Southeast Asia Linkages*. Honolulu. Asia Pacific Center for Security Studies Alagappa, Muthiah. 1986. *US-ASEAN Security Co-operation Limits and*
- Anderson, Mary B. *Do No Harm: How Aid Can Support Peace—Or War*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1999.
- Anselin L, Rey SJ. 2010. *Perspective on Spatial Data Analysis*. Springer
- Anselin, L. 1988. *Spatial Econometrics: Methods and Models*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. April 2014.
- Arbia G and Baltagi BH. 2009. *Spatial Econometrics. Method and Application*. Physica-Verlag. Springer, New York USA
- Ateneo de Zamboanga University, 2006.

- Atkinson, Garrett, "Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman—A review of the rise of Islamic
- Azra, Azyumardi, (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Islam dalam Dinamika Asia Tenggara*, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Azra, Azyumardi, *Kebangkitan Islam akan Muncul dari melayu*, dalam buku *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeflich Hasbullah, Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Banlaoi, Rommel C. "'Radical Muslim terrorism.'" *Handbook on Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, London: Edward Elgar (2007): 195.
- Banlaoi, Rommel C. "Current terrorist groups and emerging extremist armed movements in the Southern Philippines." *The study of national security at fifty: re-awakenings*. National Defense College of the Philippines, Quezon City (2014): 163-181.
- Banlaoi, Rommel C. "Maritime Piracy in Southeast Asia: current situation, countermeasures, achievements and recurring challenges." *Conference on Global Challenge, Regional Responses: Forging a Common Approach to Maritime Piracy*. 2011.
- Banlaoi, Rommel C. "Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat." *Naval War College Review* 58.4 (2005): 63-82.
- Banlaoi, Rommel C. "Radical Muslim terrorism in the Philippines." *Handbook on Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*. London: Edward Elgar Publishing, Limited (2006).
- Banlaoi, Rommel C. "Security cooperation and conflict in Southeast Asia after 9/11: constructivism, the ASEAN Way and the war on terrorism." *Asia in the New Millennium* (2004).
- Banlaoi, Rommel C. "Southeast Asian perspectives on the rise of China: regional security after 9/11." *Parameters* 33.2 (2003): 98.
- Banlaoi, Rommel C. "The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines: Threat and Response. In *The US and the War on Terror in the Philippines*, ed. Patricio Abinales and Nathan Quimpo. Manila: Anvil." (2008).
- Banlaoi, Rommel C. "The Abu Sayyaf Group: From mere banditry to genuine terrorism." *Southeast Asian Affairs* (2006): 247-262.
- Banlaoi, Rommel C. "The Abu Sayyaf group: Threat of maritime piracy and terrorism." *Peter Lehr: Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism*, New York, London: Routledge (2007): 121-135.
- Banlaoi, Rommel C. "The role of Philippine—American relations in the global campaign against terrorism: implications for regional security." *Contemporary Southeast Asia* (2002): 294-312.
- Banlaoi, Rommel C. "The Sources of the Abu Sayyaf's Resilience in the Southern Philippines." *CTC Sentinel* 3.5 (2010): 17-19.
- Banlaoi, Rommel C. *Al-Harakatul Al Islamiyyah: Essays on the Abu Sayyaf Group*. Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR), 2008.

- Banlaoi, Rommel C. Counter terrorism measures in Southeast Asia: how effective are they?. Manila: Yuchengco Center, De La Salle University, 2009.
- Banlaoi, Rommel C. Maritime Security Threats in Post-9/11 Southeast Asia: Regional Responses. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009.
- Banlaoi, Rommel C. War on terrorism in Southeast Asia. Rex Bookstore, Inc., 2004.
- Banlaoi, Rommel C., "Al Harakatul Al Islamiyah:Essays on the Abu Sayyaf Group," Philippine
- Banlaoi, Rommel C., and Clarita R. Carlos. Political Parties in the Philippines from 1900 to the Present. Konrad Adenauer Stiftung, 1996.
- Bantay Ceasefi re Report. "Skirmishes and Displacement of Civilians in Maguindanao from June to July 2006."
- Baroja, Julio Caro. "A Historical Account of Several Confl icts."In J.G. Peristiany. Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Bartolome, Claribel D. "Maratabat and Rido: Implications for Peace and National Development." Department of Graduate Studies/ Psychology College of Social Science and Humanities. Mindanao State University, 2001.
- Barton, Roy Franklin. The Kalingas: Their Institutions and Custom Law. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
- Bastin, John and D.C. Twitchett. General Editors. Sejarah Melayu or Malay Annals. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1970.
- Bates, Robert. Prosperity and Violence: The Political Economy of Development. New York and London: W.W. Norton & Company, 2001.
- Boehm, Christopher. Blood Revenge. The Anthropology of Feuding in Montenegro and Other Tribal Societies. Lawrence: University Press of Kansas, 1984.
- Buntoro, Kresno. 2016. *Maritime Terrorism Dalam Aspek Hukum Internasional*.
- Cholid, Sofyan. Sistem Informasi Geografis: Suatu Pengantar. Bogor: Staff Akademik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. 2009.
- Clamor, Ma Concepcion B.. 2002. Terrorism and Southeast Asia: APhilippines Perspective. Hawaii. Asiapacific Center for Security Studies.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dayag-Laylo, Carijane. "Exploring Confl ict Management in the Autonomous Region of Muslim Mindanao." Presented paper. 4th Asian Regional Conference of the World Association for Public Opinion Research (WAPOR). Asian Institute of Management Conference Center, Makati City, 23-24 February 2004.
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.2001. Kampanye Amerika Serikat dan Dunia Internasional untuk Mengakhiri Terorisme Global. Washington D.C. Department Of State.
- Dozier, Edward P. Mountain Arbiters: The Changing Life of a Philippine Hill People. Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, 1966.

- Eddy Prahasta, 2001, *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Penerbit Informatika, Bandung.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Minoritas Muslim Asia Tenggara*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, 6 Jilid, Bandung: Mizan, 2001.
- Esposito, John L., *The Oxford Encyclapedi of Tin Modem Islamic World*, New York Oxford University Press, 1987.
- Esposito, L., John, *Islam The Straight Path*, terj. Arif Maftuhin, Islam Warnawarni: Ragam Ekspresi Menuju "jalan lurus", (Jakarta: Paramadina, 2004
- Esposito, L., John, *Un Holy War*, terj. Syafruddin Hasani, *Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003
- Fadl, Abu, Kholed, *Islam Tantangan Demokrasi*, terj. (Jakarta: Ufuk Press, 2004),
- Ficher MM and Getis A. 2010. *Handbook of Applied Spatial Analysis Software Tools, Methods and Applications*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Fotheringham, A.S., Brundson, C., dan Charlton, M. (2002) "Geographically Weighted Regression: the analysis of spatially varying relationships", John Wiley & Sons Ltd, England.
- Fotheringham. Stewart. A., *Quantitative Geography- Perspective on Spatial Data Analysis*, SAGE Publication, London, 2005
- Gaddis, John Lewis. 2002. *A Grand Strategy of Transformation dalam Foreign Policy: November/Desember 2002*. diakses pada 16 April 2014.
- Gaetan C and Guyon X. 2010. *Spatial Statistics and Modelling*. Springer
- Ginat, Joseph. *Blood Revenge: Family Honor, Mediation, and Outcasting*. 2nd ed. Great Britain: Sussex Academic Press, 1997.
- Goda, Toh. Ed. *Political Culture and Ethnicity: An Anthropological Study in Southeast Asia*. Quezon City: Toh Goda and New Day Publishers, 1999.
- Gowing, Peter G. *Muslim Filipina: Heritage and Horizon*, (Quezon City: NewDay Publication, 1984
- HA, Saripudin. 2000. *Negara Sekuler: Sebuah Polemik*. Jakarta. P.T. Abadi.
- Hasluck, Margaret. *The Unwritten Law in Albania*. Ed. J.H. Hutton. Great Britain: The Syndics of the Cambridge University Press, 1954.
- Hefner, W., Robert, , *Islam dalam Era "Nation-State": Politik dan pembaruan Islam Asia Tenggara*, dalam buku *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, editor: Moeflich Hasbullah, Bandung: Fokusmedia, 2003
- Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat Komaruddin dan ahmad Gaus AF, pengantar Editor dalam, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Hutton, J.H. "Introduction." In Margaret Hasluck. *The Unwritten Law in Albania*. Edited by J.H. Hutton. Great Britain: The Syndics of the Cambridge University Press, 1954: xi-xv.

- I Wayan Nuarsa, 2005, *Menganalisa Data Spasial dengan ArcView GIS 3.3*, Penerbit Informatika, Bandung.
- McKenna, Thomas M. *The Philippines*," South-South Network for Non-State Armed Group Engagement and the Institute for Political Violence and Terrorisme Research, 2008.
- Insurgency in the Southern Philippines*,"Perspective Journal of American Security Project, March 2012.
- Isaaks EH, Srivastava RH. 1989. *Applied Geostatistics*.. Oxford University Press.
- Jenista, Frank Lawrence. *The White Apos: American Governors on the Cordillera Central*. Quezon City: New Day Publishers, 1987.
- Junker, Laura Lee. *Raiding, Trading, and Feasting: The Political Economy of Philippine Chiefdoms*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2000.
- Kettani, Ali, M ., *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, terj. Zarkowie soejoeti, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005,
- Kiefer, Thomas M. *The Tausug: Violence and Law in a Philippine Moslem Society*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1972.
- King, Victor T. *The Peoples of Borneo*. Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 1993.
- Kitingan, Datuk Joseph Pairin. Foreword. In *Native Court and Customary Law of Sabah (with Cases and Decisions)*. Sabah, Malaysia: Dato' Syed Ahmad Iddid bin Syed Abdullah Iddid, 1993.
- Kompas, "AS-Filipina Sepakati Perjanjian Militer", Kompas, 14 Februari 2002.
- Kymlicka, Will *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI
- Layson, Roberto C. "Fields of Hope: Breaking Cultural and Religious Barriers." *MindaNews*. 6 Nov 2005
- Lee, J. dan Wong, D. W. S. (2001), *Statistical Analysis with Arcview GIS*, John Wiley and Sons, New York.
- Le Sage, J.P. dan Pace, R.K. (2009), *Introduction to Spasial Econometrics*, R Press, Boca Ration.
- Majul, Cesar A, *Dinamika Islam Filipina*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- McKenna, Thomas M. *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Mednick, Melvin , "Some Problems of Moro History and Political Organization", dalam Peter G. Growing & Robert D. McAmis (ed.) *The Mulim Filipinos, Their History, Society and Contemporary Problems* (Manila: Solidaridad Publishing House, 1974), hal. 16. Dalam Adriana Elisabeth, "Daerah Otonomi Muslim Mindanao: Dinamika, Tantangan dan Prospek", *Gerakan Militan Islam*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2003
- Miller, William Ian. *Humiliation And Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.
- Mindanawon Institute for Cultural Dialogues. "Taking Rido Seriously: Top Level Participatory Analysis of Clan Confl icts and Community Confl icts

- in Mindanao." Unpublished conference proceedings. Marco Polo Hotel, 2005.
- Mindanews Online, "Abu Sayyaf kills 7, injures 18 rubber plantation workers in Basilan
- Mulder, Niels, *Wacana Publik Asia Tenggara*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Muscat, Robert J. *Investing in Peace: How Development Aid Can Prevent Or Promote Conflict*. New York & England: M.E. Sharpe, 2002.
- Ninh, Kim. "Democratic Governance and Conflict Management in Asia." Unpublished presentation by The Asia Foundation. Presented in Bangkok, Thailand, June 7 to 8, 2003.
- Noel Cressie. 1993. *Statistics for Spatial Data*. Wiley & Sons.
- Nye, Robert A. *Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998.
- Pabottinggi, Mochtar, et.al., *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Peristiany, J.G. *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Phelan, Brother Peter R. "Native Law in Sabah." In *Native Court and Customary Law of Sabah (with Cases and Decisions)*. Sabah, Malaysia: Dato' Syed Ahmad Idid bin Syed Abdullah Idid, 1993.
- Pitt-Rivers, Julian. "Honour and Social Status." In J.G. Peristiany. *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Possibilities. Malaysia. Institute of Strategic and International Studies (ISIS).
- Prahasta, Eddy. *SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS, Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*. Jakarta: Informatika. 2009.
- Prill-Brett, June. *Pechen: The Bontok Peace Pact Institution*. Baguio City: Cordillera Studies Center, University of the Philippines, College Baguio, 1987.
- Rabi, Abu- M., Ibrahim, *Intellectual Origins Resurgence in Modern Arab World*, New York: State University of New York Press, 1996
- Ramadhan, Tariq, *Western Muslims and the Future of Islam*, Oxford Press, 2001
- Riswanto, Ridwan Melay, Tugiman. 01 Maret 2014,
- Rixhon, Gerard. "Tausug and Corsican Feuding: An Exploration." Presented paper.
- Roger et al. 2008. *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer-Verlag
- Rommel, C. Banlaoi. "Counter Terrorism Measures in Southeast Asia: How Effective Are They." Google Scholar (2009).
- Rood, Steven. "Forging Sustainable Peace in Mindanao: The Role of Civil Society." *Policy Studies* 17. Washington: East-West Center Washington, 2005.
- Rosaldo, Renato. *Ilongot Headhunting 1883-1974: A Study in Society and History*. Stanford, California: Stanford University Press, 1980.

- Rouiller, Jean-paul. 2002. Transnational Violence and Seams of lawlessness in the Asia-Pasific: Lingkage to global Terrorism. Hawaii. Asia Pasific Center for Security Studies to global Terrorism. Hawaii. Asia Pasific Centerfor Security Studies.
- Rumsfeld, Donald H.. 2001. Quardrennial Defense Review. US Department of Defense.
- Sadahiro, Yukio. Course #716-26 Advanced Urban Analysis E. Lecture Title: - Spatial Analysis using GIS – Associate professor of the Department of Urban. Japan: Engineering, University of Tokyo. 2006.
- Salzman, Philip Carl. “Foreword to the fi rst edition.” In Joseph Ginat. Blood Revenge: Family Honor, Mediation, and Outcasting. Great Britain: Sussex Academic Press, 1997.
- Sandra LA.1996.Practical handbook of Spatial Statistics.CRC Press.Inc.USA.
- Santos, Soliman Jr. M. 2005. Peace Zones in the Philippines: Concept, Policy and Instruments. Quezon City: Gaston Z. Ortigas Peace Institute and The Asia Foundation,
- Santos, Soliman M. et al., “Primed And Purposeful Armed Groups And Human Security Efforts
- Scott, William Henry.1982. Cracks in the Parchment Curtain and Other Essays in Philippine History. Quezon City: New Day Publishers,
- Setyawanto, L. Tri. 2016. *Pengaturan Hukum Nasional dan Internasional tentang Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Seymour-Smith, Charlotte. Dictionary of Anthropology. Boston: G.K. Hall & Co., 1986.
- Singh, D.S. Ranjit. The Making of Sabah 1865-1941: The Dynamics of Indigenous Society. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2000.
- Smith, Anthony. 2002.US security toward Southeast Asia After 11/9. Hawaii Asia Pacific Center for SecurityStudies.
- Snitwongse, Kusuma. 2002. SoutheastAsia in 2001: A Paradigm in Transition dalam Southeast Asian Affairs 2002. Singapore. Institute of Southeast AsianStudies.
- Social Weather Stations. “Confl ict Resolution and the Participation of Women in Peace, Governance and Development: An Integration of Three Surveys.” Presented paper in collaboration with the U.P. Institute of Islamic Studies and the Offi ce of the Presidential Adviser on the Peace Process. U.P. ISSI, Quezon City, 21 February 2005.
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Semarang: Seminar Nasional Maritim Terrorisme (Undip)*.
- Subagyo, P. Joko. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Surwardono. 2013 Manajemen Konflik Separatisme:Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mondanao.Yogyakarta: Pusataka pelajar Offset.
- The Asia Foundation, 2001. America’s Role in Asia, Singapore. Asian Views.U.S. Department of Defense. 2001. Quardrennial Defense Review: Defense Strategy.

- Torres, Wilfredo III M. "Voyages and Ethnicity Across Reordered Frontiers: Conflict Resolution and Leadership in the Dynamics of Ethnic Identity Formation Among the Sama Dilaut of Semporna." *Negotiating Globalization in Asia*. Ateneo Center for Asian Studies, 2006.
- Umar Suryadi Bakry, Pemanfaatan Metode Etnograf dan Netnograf Dalam Penelitian Hubungan Internasional, jurnal *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2017 h.15-26.
- Yu Xintian, *Cultural Impact on International Relations*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002.
- Yu Xintian, *Cultural Factors in International Relations*. Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, 2004.
- Wackernagel H. 1995. *Multivariate Geostatistics, An Introduction with Applications*. Springer-Verlag.
- Wiharyanto, A Kardiyat. 2011. *Sejarah Asia Tenggara Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerjasama Asean*. Yogyakarta: Dharma.
- Zagar, Mitja. "Yugoslavia, What Went Wrong? Constitutional Development and Collapse of a Multiethnic State." In Sean Byrne and Cynthia L. Irvin. (Eds). *Reconcilable Differences: Turning Points in Ethnopolitical Conflict*. Kumarian Press, Inc., 2000.

SUMBER INTERNET

- 18-rubber-plantation-workers-in-basilanambush/, diakses pada 15 April 2014. 64 Philstar News Online, "Abu Sayyaf abducts school principal in Sumisip," <http://www.philstar.com>.
- Aljazeera News Online, "Abu Sayyaf commander killed in raid," <http://www.aljazeera.com/news/>
- Allvoices News Online, "7 Filipino Marines Die, 21 Wounded in Clash," <http://www.allvoices.com>.
- Al-Qaeda's Infrastructure in Asia, sumber: <http://www4.janes.com>
- Ambush," <http://www.mindanews.com/topstories/2012/07/12/abu-sayyaf-kills-7-injures->
- BBC News Online, "Bloody end to Manila jail break," <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4349471.stm>, diakses pada 14 April 2014.
- BBC News Online, "Key Abu Sayyaf member 'arrested' in the Philippines," <http://news.bbc.com>.
- BBC News Online, "Philippines troops clash with Abu Sayyaf-12 dead," <http://www.bbc.com/>
- BBC News Online, "US drone 'kills Filipino militant Abdul Basit Usman,'" <http://news.bbc.co.uk/2/>
- CBS News Online, "Abu Sayyaf Timeline," http://www.cbsnews.com/htdocs/abu_sayyaf/
- CNN News Online, "Timeline: Hostage crisis in the Philippines," <http://edition.cnn.com/2002/>

Frank Connolly, "FBI Agents Knew of Plan to Bomb the Pentagon," Sunday Business Post, September 23, 2001. diakses pada 15 April 2014.

Global Jihad Official Site, "Abubakar and KhadafyJanjalani," http://www.globaljihad.net/view_

Global Jihad Official Site, "Radulan Sahiron," http://www.globaljihad.net/view_page.asp?id=1409,

GMA News Online, "Abu Sayyaf kidnappings, bombings and other attacks," <http://www.gmanetwork.com/news/story/154797/news/abu-sayyaf-kidnappings-bombings-and-otherattacks>, diakses pada 14 April 2014.

Guardian News Online, The, "Jehovah's Witnesses beheaded in Philippines," <http://www.guardian.com/world/2014/apr/11/abu-sayyaf-extremists-battle-troops-philippines>, diakses pada 13 April 2014.

Guardian Online, The, "Philippines arrests 'foil bomb plot,'" <http://www.theguardian.com/world/2004/mar/30/alqaida.terrorism>, diakses pada 14 April

<http://www.theguardian.com/world/2014/apr/11/abu-sayyaf-extremists-battle-troops-philippines>, diakses pada 14 April 2014.

<http://adha-coba-coba.blogspot.com/2012/01/Islam-di-filipina.html>

<http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/11693224905.pdf>,

<http://peraturan.go.id/perpu/nomor-1-tahun-2002.html>, (diakses 11 Juni 2016).

[http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4756/1.Riswanto.pdf?sequence=1](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4756/1/Riswanto.pdf?sequence=1) Konflik Muslim Moro Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996 (Suatu Kajian Historis).

<http://www.nytimes.com/2002/06/22/world/philippines-reports-a-top-Muslim-rebel-leaderdied-in-clash.html>, diakses pada 16 April 2014.

<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2010/02/28/2003466812>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017.

id.wikipedia.org/wiki/Mindanao

id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moro

[id/6967810/ns/world_news/t/terror-groupclaims-blasts-philippines/#.U0uooKJT6FA](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moro), diakses pada 14 April 2014.

NBC News Online, "Terror group claims 3 blastin Philippines," <http://www.nbcnews.com/>

New York Times Online, "20 Kidnapped From Malaysian Resort Island," <http://www.nytimes.com/>

New York Times Online, "Kidnapped Australian Is Freed in Southern Philippines," <http://www.nytimes.com/>

New York Times Online, "Philippines Reports a Top Muslim Rebel Leader Died in Clash,"

- New York Times Online, "Volatile Philippine Region Courts Tourists, Cautiously," <http://www.news/2009/feb/27/abu-sayyaf-back-to-terror/?page=all>, diakses pada 16 April 2014.
- [news/world-asia-22664820](http://www.news/world-asia-22664820), diakses pada 18 April 2014.
- [nytimes.com/2012/04/15/world/asia/promoting-tourism-on-beautiful-but-violent-tawi-tawi](http://www.nytimes.com/2012/04/15/world/asia/promoting-tourism-on-beautiful-but-violent-tawi-tawi).
- [nytimes.com/2013/03/24/world/asia/kidnapped-australian-is-freed-in-southern-philippines](http://www.nytimes.com/2013/03/24/world/asia/kidnapped-australian-is-freed-in-southern-philippines).
- Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/277175313_Pemanfaatan_Analisis_Spasial_untuk_Pengolahan_Data_Spasial_Sistem_Informasi_Geografi [accessed Apr 25, 2017].
- Philstar News Online, "Abu Sayyaf abducts school principal in Sumisip," <http://www.philstar.page.asp?id=826>, diakses pada 14 April 2014.
- Philstar News Online, "Couple kidnapped by Abu Sayyaf Group in Jolo," <http://www.philstar.com>, diakses pada 14 April 2014.
- Philstar News Online, "Super Ferry sinking a terrorist attack," <http://www.philstar.com/>
- President George W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, September 20, 2001, available at <http://whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>.
- Rice, 2000, "GIS/Data Center : GIS Links", <http://riceinfo.rice.edu/Fondren/GDC/gislinks.shtml>
- <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2013/11/17/2003577064>, diakses pada September 2005.
- Syukur, Yanuardi, 17 Juni 2017. "Membaca Omar Maute", https://c.uctalks.ucweb.com/detail/d67d4c955f5f4fc3a3b569190dde70f9?uc_param_str=dnvebichfrmintcpwidsudsvnwplflameefut&stat_entry=personal&comment_stat=1
- Taipei Times News Online, "Eleven die in Abu Sayyaf attack in Philippines: officials,"
- Taipei Times Online, "Abu Sayyaf behind Taiwanese man's murder, wife's kidnapping, police", [theguardian.com/world/2002/aug/22/alqaida.terrorism](http://www.theguardian.com/world/2002/aug/22/alqaida.terrorism), diakses pada 14 April 2014.
- Tuman, 2001, "Overview of GIS", <http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman006.htm>
- <http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-asia-16849271>, diakses pada 16 April 2014.
- Washington Times Online, "Abu Sayyaf back to terror," <http://www.washingtontimes.com/>
- WORLD/asiapcf/southeast/06/07/phil.timeline.hostage/, diakses pada 14 April 2014.

- Zambo Times News Online, "What a new ASG leader could bring," <http://www.zambotimes>
- "Malaysian Police Detain More Suspected Islamic Militants," Associated Press, October 10, 2001. (diakses 11 Juni 2016).
- Anonim. 2013. Perjanjian Paris. Online (http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Paris_%281898%29). Diakses tanggal 01 Maret 2014.
- Asia-pacific/2010/02/20102217219857969.html, diakses pada 14 April 2014
- Badilla, Joselle. "Soldiers, MILF rebels help free kidnapping victim." *Philippine Daily Inquirer*. June 6, 2006: A13.
- Business World. "Kidnapped girl released." May 15, 2006. Page 12.
- Defense, "Combating Terrorism in the Asia-pacific Region", sumber: <http://www.Defense.link>
- FBI Official Site, "Isnilon Totoni Hapilon," http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/isnilontotoni-hapilon/view, diakses pada 14 April 2014
- Gershman, John. 2002. Is Southeast Asia the Second Front? Dalam *Foreign Affairs: July/August 2002*. diakses pada 15 April 2014.
- .BBC News Online, "Philippine military 'kills three. [hi/8473921.stm](http://www.bbc.com/news/asia-14484739), diakses pada 14 April 2014
- Keele ,1997,"An Introduction to GIS using ArcView : Tutorial", Issue 1, Spring 1997 based on Arcview release 3, http://www.keele.ac.uk/depts/cc/helpdesk/arcview/av_prfc.htm
- Keenan, Peter , 1997,"Using a GIS as a DSS Generator", Dept. of Management Information Systems, University College Dublin, http://mis.ucd.ie/staff/pkeen/gis_as_a_dss.html
- Miller, Harvey J., 1996, "GIS and geometric representation in facility location problems," *International Journal of Geographical Information Systems*, 10, 791-816, <http://www.geog.utah.edu/~hmliller/papers/gisgeoab.htm>
- Noralyn Mustafa, "Sipadan Hostage-Taking: A Year Ago," *Philippine Daily Inquirer* , April 22, 2001, p. 18.
- Papa, Alcuin. "Lanao clan war kills 10." *Philippine Daily Inquirer*. 6 Jan 2006: A2.
- Robert Frank and James Hookway, "Abu Sayyaf: The Long Tentacles of Terror," *The Wall Street Journal* , September 25, 2001, p. A12.